

# RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA 2025

*Dinas Pariwisata dan Kebudayaan*



## **DAFTAR ISI**

<b>DAFTAR ISI .....</b>	i
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan .....	4
1.4. Sistematika Penulisan .....	6
<b>BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU.....</b>	7
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD .....	7
2.2. Analisis Kerja Pelayanan OPD .....	13
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD.....	15
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	15
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	46
<b>BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN .....</b>	47
3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi .....	47
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD .....	49
3.3. Program dan Kegiatan .....	50
<b>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN.....</b>	60
<b>PENUTUP .....</b>	67



## **DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan Pencapaian Renstra OPD s/d Tahun 2021 Kabupaten Kepulauan Anambas .....	9
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Pelayanan OPD Kabupaten Kepulauan Anambas..	14
Tabel 2.3	Daftar Prioritas Pembangunan tahun 2020 Kabupaten Kepulauan Anambas.....	17
Tabel 2.4	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2023 Kabupaten Kepulauan Anambas .....	20
Tabel 2.5	Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Kabupaten Kepulauan Anambas.....	46
Tabel 3.1	Identifikasi Kebijakan Nasional Kabupaten Kepulauan Anambas.....	47
Tabel 3.2	Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Anambas .....	49
Tabel 3.3	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD tahun 2022 Kabupaten Kepulauan Anambas .....	51



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) merupakan dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Hal tersebut ditetapkan melalui Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sedangkan pedoman tahapan dan tata cara penyusunan Renja-OPD tertuang pada Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Renja merupakan penjabaran dari Renstra OPD yang pada dasarnya dapat mempermudah setiap OPD untuk melaksanakan program dan kegiatan sesuai capaian yang ingin diraih. Rentang waktu perencanaan lima tahun pada Renstra perlu pengawalan yang terstruktur sesuai dengan dinamika perkembangan pembangunan yang terjadi pada masing-masing OPD. Dinamika yang terjadi ini dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor internal maupun eksternal seputar isu-isu sektoral OPD atau perkembangan wilayah. Perkembangan ataupun perubahan yang terjadi tentunya memerlukan penyesuaian dan antisipasi langkah ke depan dalam pencapaian target pembangunan, sehingga pelaksanaan setiap program dan kegiatan dapat senantiasa terarah dan tetap pada jalur perencanaan pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja OPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja OPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting OPD, evaluasi



pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra OPD. Selain itu untuk mengakomodir kebutuhan sektoral, Renja-OPD memuat juga masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Renja-OPD memuat program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pagu indikatif beserta prakiraan maju. Pagu indikatif sangat terkait dengan proses penyusunan RAPBD sehingga tercapai keselarasan pembangunan. Serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

## 1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan renja ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kepulauan Anambas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...);
5. Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan



Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan presiden republik indonesia nomor 33 tahun 2020 tentang standar harga satuan regional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);



12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Permendagri nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050-3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016-2021;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.
17. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor... Tahun... tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020
18. Rancangan Awal RKPD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022.

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari penyusunan Renja ini adalah sebagai berikut:

1. Mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan;



2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar Daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah;
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan;
6. Menyediakan arah dan panduan bagi pembangunan di Bidang Pariwisata dan Kebudayaan, sehingga dapat dilaksanakan secara terpadu antar sektor.



## 1.4 Sistematika Penulisan

Renja disusun dengan sistematika sebagai berikut:

### BAB I PENDAHULUAN

Bab I memuat mengenai latar belakang penyusunan Renja, landasan hukum yang mendasari penyusunan dan substansi Renja, maksud dan tujuan dari penyusunan Renja, serta sistematika penulisan.

### BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

Bab II memberikan penjelasan dan pembahasan mengenai Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD, Analisis Kinerja Pelayanan OPD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD, Review terhadap Rancangan Awal RKPD, serta Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

### BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Bab III menguraikan Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi, Tujuan dan sasaran Renja OPD, Program dan Kegiatan.

### BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Berisi tentang program beserta indicator keberhasilan program serta penjelasan kegiatan beserta output dan outcome yang diinginkan

### BAB V PENUTUP

Bab V menyampaikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan. Selain itu bab ini juga memuat kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.



## BAB II

### EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU (T.A 2023)

#### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD

Evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menyatakan hasil sebagai berikut:

Terdapat realisasi **6 program / 12 kegiatan** yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, meliputi:

#### 1. Program Pengembangan Kebudayaan

Kegiatan :

- 1.1 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
- 1.2 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota

#### 2. Program Pengembangan Kesenian Tradisional

Kegiatan :

- 2.1. Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota

#### 3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan:

- 3.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 3.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- 3.3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- 3.4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 3.5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 3.6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah



#### **4. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata**

Kegiatan :

- 4.1. Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota

#### **5. Program Pemasaran Pariwisata**

Kegiatan :

- 5.1. Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota

#### **6. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif**

Kegiatan :

- 6.1. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar

Lebih lanjut hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dapat diamati pada tabel di halaman selanjutnya:



Tabel 2.1  
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan  
Pencapaian Renstra OPD s/d Tahun 2023  
Kabupaten Kepulauan Anambas

Lembar : 01

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja OPD tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun Berjalan		
						Target Renja OPD tahun (2023)	Realisasi Renja OPD tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)		
2			<b>Urusan Wajib</b>									
2	22		Bidang Urusan Kebudayaan									
2	22	02	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN</b>									
2	22	02	2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan	1 Kegiatan	21 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	1 Kegiatan	23	23
2	22	02	2.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan yang diikuti untuk Pengembangan Kebudayaan	1 Kegiatan	3 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	1 Kegiatan	5	5
2	22	03	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN</b>									



KESENIAN TRADISIONAL													
2	22	03	2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan yang akan dilaksanakan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	1 Kegiatan	3	3
3				Urusan Pilihan									
3	26			Bidang Urusan Pariwisata									
3	26	01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota									
3	26	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Percentase Tersedianya Dokumen Perencanaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	4	4
3	26	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Percentase Kualitas SDM Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	4	4
3	26	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Percentase Kualitas SDM Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	4	4
3	26	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Percentase Kualitas administrasi umum Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	4	4
3	26	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Percentase Jasa Penunjang Di Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	4	4



3	26	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Sarana Dan Prasarana Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	4	4
3	26	02		<b>Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata</b>									
3	26	02	2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Daya Tarik Wisata yang dilaksanakan oleh daerah	20%	85%	20%	35%	175%	40%	1.7%	0.085%
3	26	03		<b>Program Pemasaran Pariwisata</b>									
3	26	03	2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase Kegiatan Pemasaran yang dilaksanakan oleh daerah	33%	40%	33%	40%	121%	50%	0.84%	0.025%
3	26	03		<b>Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif</b>									
3	26	05	2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah Peserta Yang Mengikuti pelatihan	0 Peserta	200 Peserta	0 Peserta	200 Peserta	100%	100	500	500





## 2.2 Analisis Kerja Pelayanan OPD

Hasil kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, pada Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan belum mempunyai tolak ukur dan indikator kinerja yang akan diuji.

Adapun Analisis Kerja Pelayanan OPD dapat dilihat dengan tabel seperti dihalaman selanjutnya :



**Tabel 2.2**  
**Indikator Kinerja Pelayanan OPD**  
**Kabupaten Kepulauan Anambas**

Nama OPD : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA						REALISASI CAPAIAN KINERJA					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN</b>													
1	Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan	10%	15%	20%	25%	30%	35%	0.16	12.14%	31,8%	-	-	-
2	Persentase peningkatan length of stay wisatawan	10%	15%	20%	25%	30%	35%	0.7	20%	20%	-	-	-
3	Jumlah budaya lokal yang dikembangkan menjadi daya tarik wisata	2	2	2	2	2	2	3	4	4	-	-	-
4	Nilai AKIP Perangkat Daerah	60	60.5	61	61.5	62	62.5	66.44	66.45	70,1	-	-	-
5	Nilai IKM Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Baik/83	Baik/84	Baik/85	Baik/86	Baik/87	Baik/88	Baik/84	81	86	-	-	-



## 2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Berdasarkan evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan Pencapaian Renstra OPD dan kondisi eksisting, maka isu-isaku yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 2025 meliputi:

1. Kemitraan antar pemerintah, swasta yang belum optimal
2. Masih terbatasnya pengembangan dan pemanfaatan potensi wisata selain daya tarik wisata utama yang menyebabkan rendahnya kunjungan dan pendeknya lama tinggal serta rendahnya pembelanjaan wisatawan
3. Masih rendahnya keterkaitan usaha pariwisata
4. Belum adanya penataan usaha pariwisata dan pendukung pariwisata di kawasan terkait
5. Belum optimalnya pemanfaatan potensi sumber daya lokal oleh industri pariwisata
6. Belum optimalnya kerja sama antarusaha pariwisata
7. Masih minimnya pemanfaatan kawasan pariwisata melalui pengembangan usaha dan industri pendukung pariwisata
8. Belum optimalnya pemanfaatan, perlindungan , pengembangan dan pembinaan kebudayaan

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah permasalahannya kurangnya Aparatur Sipil Negara Khususnya di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menguasai Perundang-undangan, Regulasi dan Peraturan yang mengatur tentang segala teknis Pariwisata secara global maupun secara spesifik. Hambatan kurangnya ada pelatihan maupun diklat untuk Aparatur yang ada di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

Dampak pencapaian visi dan misi kepala daerah terhadap capaian program nasional supaya tercipta sinergisitas dan sinkronisasi pelaksanaan pembangunan antar wilayah, antar sektor, serta terciptanya efektifitas dan efisiensi alokasi anggaran khususnya dalam hal pariwisata.

## 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD ini dilakukan terhadap prioritas pembangunan tahun 2025, prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program / kegiatan, tolak ukur atau target sasaran program / kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program / kegiatan untuk OPD yang bersangkutan.



Tema pembangunan 2025 “ Optimalisasi pembangunan ekonomi, sumber daya manusia dan infrastruktur berkelanjutan. Maka dirumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional tahun 2025 sebagai berikut:

1. Peningkatan pemanfaatan sumberdaya ekonomi unggulan daerah;
2. Pemanfaatan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul, dan berdaya saing;
3. Pemerataan infrastruktur wilayah yang berkualitas; dan
4. Optimalisasi reformasi birokrasi.

Prioritas pembangunan nasional yang telah tersusun ini akan menjadi acuan dalam menetapkan tema dan prioritas pembangunan daerah, dan dalam menjabarkan program / kegiatan tahun 2025.



**Tabel 2.3**  
**Daftar Prioritas Pembangunan tahun 2025**  
**Kabupaten Kepulauan Anambas**

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	KINERJA		PDPJ
			INDIKATOR	TARGET	
1	Peningkatan pemanfaatan sumberdaya ekonomi unggulan daerah	Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase destinasi pariwisata yang dilakukan peningkatan	80%	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		Program Pemasaran Pariwisata	Persentase objek destinasi dan event pariwisata yang dipasarkan	83%	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase SDM sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang menerima pengembangan kompetensi	75%	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2	Optimalisasi reformasi birokrasi.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan Pemerintahan	100%	Seluruh PD
3	Pemanfaatan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul, dan berdaya saing	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase pelaku seni untuk mengenal, memahami, menghargai dan ikut melestarikan nilai budaya	88%	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase pertunjukan kesenian tradisional di Kecamatan	70%	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan



NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	KINERJA		PDPJ
			INDIKATOR	TARGET	
		Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase cagar budaya yang dilestarikan dan dikelola	75%	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Dari tabel di atas, program dan kegiatan Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan berkorelasi terhadap prioritas pembangunan nomor 1, 2 dan 4 yaitu:

1. Peningkatan pemanfaatan sumberdaya ekonomi unggulan daerah dengan program:
  - Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata;
  - Program Pemasaran Pariwisata;
  - Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif .
2. Optimalisasi reformasi birokrasi.:
  - Penunjang urusan Pemerintah Daerah Kab/ kota
3. Pemanfaatan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul, dan berdaya saing:
  - Program pengembangan Kebudayaan;
  - Program pengembangan Kesenian Tradisional;
  - Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya;

Sebagaimana program dan kegiatan urusan bidang Kebudayaan dan Pariwisata yang tertuang dalam Rencana Kerja Kerja Pemerintah daerah (RKPD) Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2025. Setelah melalui pertimbangan analisa kebutuhan program dan kegiatan serta anggaran yang akan menjadi garapan yang akan dilaksanakan tahun 2025 diperlukan perubahan/penyesuaian atas RKPD dimaksud, yang merupakan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Anambas. Selanjutnya hasil review terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada tabel berikut:



**Tabel 2.4**  
**Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025**  
**Kabupaten Kepulauan Anambas**

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
No.	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp.)	CATA TAN PENTING
1	2	4	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	KKA	Cakupan layanan Pemerintahan	100%	5.858.288.200					5.858.288.200	
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	KKA	Persentase Tersedianya Dokumen Perencanaan	100%		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	KKA	Tersedianya Dokumen Perencanaan	100%		
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	KKA	Jumlah Dokumen yang dibuat	1 Dokumen	200.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	KKA	Jumlah Dokumen yang dibuat	1 Dokumen	200.000.000	Urusan Pilihan:



Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
No.	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIA TAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp.)	CATA TAN PENTING
1	2	4	3	5	6	7	8	9	10	11	12
											Pariw sata
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	KKA	Persentase Kualitas SDM Di dinas Pariwsata Dan Kebudayaan	100%		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	KKK	Persentase Kualitas SDM Di dinas Pariwsata Dan Kebudayaan	100%		
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	KKK	Persentase Pembayaran gaji dan tunjangan ASN	100%	3.638.036.916	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	KKK	Persentase Pembayaran gaji dan tunjangan ASN	100%	3.638.036.916	Urusa n Pilih a n: Pariwi sata
1.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi	KKK	Persentase pembayaran honor PPKD	100%	190.920.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan	KKK	Persentase pembayaran honor PPKD	100%	190.920.000	Urusa n Pilih a n



Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
No.	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp.)	CATA TAN PENTING
1	2	4	3	5	6	7	8	9	10	11	12
	Keuangan SKPD					Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					n: Pariwisa ta
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	KKA	Persentase Kualitas SDM Didinas Pariwsata Dan Kebudayaan	100%		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	KKA	Meningkatnya Kualitas SDM Didinas Pariwsata Dan Kebudayaan	100%		
1.3.1	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	KKA	Persentase Pelaksanaan Sosialisasi yang dikuti	100%	Rp 50.000.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	KKA	Persentase Pelaksanaan Sosialisasi yang dikuti	100%	Rp 50.000.000	Urusan Pilihan: Pariwisa ta
1.3.2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	KKA	Persentase Pelaksanaan Bimtek Yang Diikuti	100%	Rp 250.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	KKA	Persentase Pelaksanaan Bimtek Yang Diikuti	100%	Rp 250.000.000	



Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
No.	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp.)	CATA TAN PENTING
1	2	4	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	KKA	Persentase Kualitas administrasi umum Di dinas Pariwsata Dan Kebudayaan	100%		Administrasi Umum Perangkat Daerah	KKA	Persentase Kualitas administrasi umum Di dinas Pariwsata Dan Kebudayaan	100%		
1.41	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	KKA	Persentase barang cetak dan penggandaan	100%	Rp 20.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	KKA	Persentase barang cetak dan penggandaan	100%	Rp 20.000.000	
1.4.2	Fasilitasi Kunjungan Tamu	KKA	Persentase fasilitasinya Kunjungan Tamu	100%	Rp 10.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	KKA	Persentase fasilitasinya Kunjungan Tamu	100%	Rp 10.000.000	Urusan Pilihannya: Pariwi
1.4.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	KKA	Persentase Bahan Logistik	100%	Rp 10.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	KKA	Persentase Bahan Logistik kantor	100%	Rp 10.000.000	



Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
No.	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIA TAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp.)	CATA TAN PENTING
1	2	4	3	5	6	7	8	9	10	11	12
			kantor								sata
1.4.4	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	KKA	Persentase Peralatan Rumah Tangga	100%	Rp 5.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	KKA	Persentase Peralatan Rumah Tangga	100%	Rp 5.000.000	
1.4.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	KKA	Persentase makan minum kegiatan	100%	Rp 10.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	KKA	Persentase makan minum kegiatan	100%	Rp 10.000.000	
1.4.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	KKA	Persentase Surat Kabar	100%	Rp 8.063.022	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	KKA	Persentase Surat Kabar	100%	Rp 8.063.022	
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	KKA	Persentase Sarana Dan Prasarana Di	100%		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	KKA	Persentase Sarana Dan Prasarana Di	100%		



Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
No.	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIA	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp.)	CATA TAN PENTING
1	2	4	3	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemerintah Daerah		dinas Pariwsata Dan Kebudayaan			Urusan Pemerintah Daerah		dinas Pariwsata Dan Kebudayaan			
1.5 1.5.1	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	KKK KKK	Persentase Sarana Dan Prasarana Di dinas Pariwsata Dan Kebudayaan Jumlah kendaraan dinas Kantor	100% 1 unit	Rp 1.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	KKK KKK	Persentase Sarana Dan Prasarana Di dinas Pariwsata Dan Kebudayaan Jumlah Kendaraan dinas Kantor	100% 1 unit	Rp 1.000.000	
1.5.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	KKK	Jumlah Peralatan mesin untuk kantor	1 unit	Rp 8.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	KKK	Jumlah Peralatan mesin untuk kantor	1 unit	Rp 8.000.000	Urusan



Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
No.	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp.)	CATA TAN PENTING
1	2	4	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1.53.	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	KKA	Jumlah Gedung Kantor	1 Unit	Rp. 1.000.000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	KKA	Jumlah Gedung Kantor	1 Unit	Rp. 1.000.000	Pilihan: Pariwisata
1.6	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	KKA	<b>Percentase Jasa Penunjang Di Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan</b>	<b>100%</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	KKA	<b>Percentase Jasa Penunjang Di Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan</b>	<b>100%</b>		
1.6.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	KKA	Percentase Tersedianya Tv kabel dan listrik di kantor	100%	Rp 75.517.734	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	KKA	Percentase Tersedianya Tv kabel dan listrik di kantor	100%	Rp 75.517.734	
1.6.2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	KKA	Percentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	Rp 5.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	KKA	Percentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	Rp 5.000.000	Urusan Pilihan:



Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
No.	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp.)	CATA TAN PENTING
1	2	4	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1.6.3	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	KKA	Persentase Tersedianya alat Tulis Kantor	100%	Rp 20.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	KKA	Persentase Tersedianya alat Tulis Kantor	100%	Rp 20.000.000	
1.6.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	KKA	Persentase pembayaran honorarium PTT	100%	Rp 990.507.998	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	KKA	Persentase pembayaran honorarium PTT	100%	Rp 990.507.998	
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	KKA	Persentase pemeliharaan Barang Di Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	100%		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	KKA	Persentase pemeliharaan Barang Di Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	100%		
1.7.1	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	KKA	Persentase pemeliharaan peralatan dan mesin	100%	Rp 10.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	KKA	Persentase pemeliharaan peralatan dan mesin	100%	Rp 10.000.000	



Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
No.	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIA TAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp.)	CATA TAN PENTING
1	2	4	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1.7.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	KKA	Persentase Terbayarnya pajak kendaraan dinas	100%	Rp 5.242.530	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	KKK	Persentase Terbayarnya pajak kendaraan dinas	100%	Rp 5.242.530	Urusan Pilihan: Pariwisata
1.7.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	KKK	Persentase Tersedianya Gedung Kantor dan gudang	100%	Rp 350.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	KKK	Persentase Tersedianya Gedung Kantor dan gudang	100%	Rp 350.000.000	
2.	Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata		Persentase destinasi pariwisata yang dilakukan	80%	Rp. 10.000.000	Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata		Persentase destinasi pariwisata yang dilakukan	80%	Rp. 10.000.000	



Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
No.	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIA TAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp.)	CATA TAN PENTING
1	2	4	3	5	6	7	8	9	10	11	12
			peningkatan					peningkatan			
2.1	Pengelolaan Daya tarik wisata Kab/kota	KKA	Persentase Peningkatan Destinasi Pariwisata	80%	Rp. 5.000.000	Pengelolaan Daya tarik wisata Kab/kota	KKA	Persentase Peningkatan Destinasi Pariwisata	80%	Rp. 5.000.000	
2.1.1	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kab/Kota	KKA	Jumlah Daya Tarik Wisata yang dikembangkan	2 Destinasi	Rp. 5.000.000	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kab/Kota	KKA	Jumlah Daya Tarik Wisata yang dikembangkan	2 Destinasi	Rp. 5.000.000	
2.2	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	KKA	Persentase Pengelolaan Destinasi Pariwisata yang dilaksanakan oleh daerah	80%	Rp. 5.000.000	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	KKA	Persentase Pengelolaan Destinasi Pariwisata yang dilaksanakan oleh daerah	80%	Rp. 5.000.000	



Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
No.	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIA TAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp.)	CATA TAN PENTING
1	2	4	3	5	6	7	8	9	10	11	12
2.2.1	Pengadaan/Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/KotaKab/ Kota	KKA	Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun	1 Lokasi	Rp. 5.000.000	Pengadaan/Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/KotaKab/ Kota	KKA	Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun	1 Lokasi	Rp. 5.000.000	
3	Program Pemasaran Pariwisata		Persentase objek destinasi dan event pariwisata yang dipasarkan	83%	Rp.15.000.000	Program Pemasaran Pariwisata		Persentase objek destinasi dan event pariwisata yang dipasarkan	83%	Rp.15.000.000	
3.2	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi	KKA	Persentase Kegiatan Pemasaran yang dilaksanakan oleh	83%		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik,	KKA	Persentase Kegiatan Pemasaran yang dilaksanakan oleh	83%		



Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
No.	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIA TAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp.)	CATA TAN PENTING
1	2	4	3	5	6	7	8	9	10	11	12
	dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		daerah			Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		daerah			
3.2.1	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	KKA	Jumlah pemasaran yang digunakan	2 Media pemasaran	Rp. 5.000.000	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	KKA	Jumlah pemasaran yang digunakan	2 Media pemasaran	Rp. 5.000.000	Urusan Pilihan: Pariwisata
3.2.2	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	KKA	Jumlah Event/Kegiatan yang dilaksanakan	2 Event/Kegiatan	Rp. 5.000.000	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	KKA	Jumlah Event/Kegiatan yang dilaksanakan	2 Event/Kegiatan	Rp. 5.000.000	
3.2.3	Monitoring dan Evaluasi	KKA	Jumlah Kegiatan Monitoring dan Evaluasi yang	1 Kegiatan	Rp. 5.000.000	Monitoring dan Evaluasi	KKA	Jumlah Kegiatan Monitoring dan Evaluasi yang	1 Kegiatan	Rp. 5.000.000	



Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
No.	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp.)	CATA TAN PENTING
1	2	4	3	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengembangan Pemasaran Pariwisata		terlaksana pengembangan pemasaran pariwisata			Pengembangan Pemasaran Pariwisata		terlaksana pengembangan pemasaran pariwisata			
3.1.3	<b>Program Pengembangan Sumber daya Pariwisata Dan ekonomi Kreatif</b>	KKA	<b>Persentase SDM sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang menerima pengembangan kompetensi</b>	75%	Rp. 5.000.000	<b>Program Pengembangan Sumber daya Pariwisata Dan ekonomi Kreatif</b>	KKK	<b>Persentase SDM sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang menerima pengembangan kompetensi</b>	75%	Rp. 5.000.000	
3.1.4	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	KKK	Jumlah Peserta Yang Mengikuti pelatihan	100 Peserta		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	KKK	Jumlah Peserta Yang Mengikuti pelatihan	100 Peserta		



Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
No.	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp.)	CATA TAN PENTING
1	2	4	3	5	6	7	8	9	10	11	12
	Tingkat Dasar					Tingkat Dasar					
3.1.5	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	KKA	jumlah peserta yang mengikuti pelatihan	50 Peserta	Rp. 5.000.000	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	KKA	jumlah peserta yang mengikuti pelatihan	50 Peserta	Rp. 5.000.000	Urusan Pilihan: Pariwisata
4.	Program Pengembangan Kebudayaan	KKA	Persentase pelaku seni untuk mengenal, memahami, menghargai dan ikut melestarikan nilai budaya	88%	Rp. 10.000.000	Program Pengembangan Kebudayaan	KKA	Persentase pelaku seni untuk mengenal, memahami, menghargai dan ikut melestarikan nilai budaya	88%	Rp. 10.000.000	



Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
No.	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIA TAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp.)	CATA TAN PENTING
1	2	4	3	5	6	7	8	9	10	11	12
4.1.	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	KKA	Jumlah Kegiatan yang diikuti untuk pengembangan kebudayaan	1 Kegiatan		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	KKK	Jumlah Kegiatan yang diikuti untuk pengembangan kebudayaan	1 Kegiatan		
4.1.1	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional (FESTIVAL SILAT MELAYU PESISIR/SERUMPUN)	KKK	Terbinanya Kelompok penggiat seni dan Kebudayaan	52 Sanggar	Rp.5.000.000	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional (FESTIVAL SILAT MELAYU PESISIR/SERUMPUN)	KKK	Terbinanya Kelompok penggiat seni dan Kebudayaan	52 Sanggar	Rp.5.000.000	



Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
No.	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIA	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp.)	CATA TAN PENTING
1	2	4	3	5	6	7	8	9	10	11	12
4.2	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	KKA	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan	1 Kegiatan		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	KKK	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan	1 Kegiatan		
4.2.1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan ( PEKAN BUDAYA DAERAH/PEKAN BUDAYA NASIONAL)	KKK	Jumlah Kegiatan pengembangan kebudayaan	1 Kegiatan	Rp. 5.000.000	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan ( PEKAN BUDAYA DAERAH/PEKAN BUDAYA NASIONAL)	KKK	Jumlah Kegiatan pengembangan kebudayaan	1 Kegiatan	Rp. 5.000.000	



Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
No.	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp.)	CATA TAN PENTING
1	2	4	3	5	6	7	8	9	10	11	12
5.	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	KKA	Persentase pertunjukan kesenian	90%	Rp. 5.000.000	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	KKA	Persentase pertunjukan kesenian	90%	Rp. 5.000.000	
5.1	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	KKA	Jumlah Kegiatan yang akan dilaksanakan	1 Kegiatan		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	KKA	Jumlah Kegiatan yang akan dilaksanakan	1 Kegiatan		Urusan Wajib : Kebudayaan
5.1.1	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	KKA	Jumlah Pengadaan Alat-Alat Kesenian Tradisional	5 Paket	Rp. 5.000.000	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	KKA	Jumlah Pengadaan Alat-Alat Kesenian Tradisional	5 Paket	Rp. 5.000.000	Urusan Wajib : Kebudayaan



Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
No.	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp.)	CATA TAN PENTING
1	2	4	3	5	6	7	8	9	10	11	12
6	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	KKA	Persentase cagar budaya yang dilestarikan dan dikelola	75%	Rp. 5.000.000	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	KKA	Persentase cagar budaya yang dilestarikan dan dikelola	75%	Rp. 5.000.000	Urusan Wajib : Kebudayaan
6.1	PENETAPAN CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN/KOTA	KKA	Jumlah Cagar Budaya yang ditetapkan	2 Cagar Budaya		PENETAPAN CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN/KOTA	KKA	Jumlah Cagar Budaya yang ditetapkan	2 Cagar Budaya		Urusan Wajib : Kebudayaan



Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
No.	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp.)	CATA TAN PENTING
1	2	4	3	5	6	7	8	9	10	11	12
6.1.1	PENDAFTARAN OBJEK DIDUGA CAGAR BUDAYA	KKA	Terdaftar dan terdatanya cagar budaya yang ada di kabupaten Kepulauan Anambas	2 Cagar Budaya	Rp. 5.000.000	PENDAFTARAN OBJEK DIDUGA CAGAR BUDAYA	KKA	Terdaftar dan terdatanya cagar budaya yang ada di kabupaten Kepulauan Anambas	2 Cagar Budaya	Rp. 5.000.000	Urusan Wajib : Kebudayaan



## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan masyarakat diperoleh melalui usulan Musrenbang, dari usulan Musrenbang tingkat Desa, Kecamatan, hingga ke tingkat Kabupaten. Dari berbagai usulan yang diperoleh, tidak terdapat usulan program ke Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

**Tabel 2.5**

**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan  
Kabupaten Kepulauan Anambas  
T.A 2025**

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan



## BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

### 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan hasil telaahan terhadap kebijakan nasional tahun berjalan, terdapat beberapa kebijakan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut:

**Tabel 3.1  
Identifikasi Kebijakan Nasional  
Kabupaten Kepulauan Anambas**

NO	KEBIJAKAN NASIONAL	SUMBER	KETERANGAN
1	Strategi Pengembangan Destinasi dan Indutsri Pariwisata	UU No.10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan	Urusan Pilihan:Pariwisata
2	Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional	PP No. 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional	Urusan Pilihan: Pariwisata
3	Pengembangan Destinasi, Kemitraan dan Pemasaran Pariwisata Daerah	PERMENDAGRI NO. 13 TAHUN 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah	Urusan Pilihan: Pariwisata
4	Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya	PERMENDAGRI NO. 13 TAHUN 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah	Urusan Wajib: Kebudayaan
5	Destinasi Pariwisata Berkelanjutan	PERMEN PARIWISATA NO. 14 TAHUN 2016 tentang Destinasi Pariwisata Berkelanjutan	Urusan Pilihan: Pariwisata

Arah kebijakan dan strategi Nasional di bidang pariwisata adalah:

#### 1. Pemasaran Pariwisata Nasional

Jenis pariwisata yang akan diandalkan dalam promosi ke Wisman mencakup:

- a. Wisata alam yang terdiri dari wisata bahari, wisata ekologi, dan wisata petualangan.
- b. Wisata budaya yang terdiri dari wisata *heritage* dan religi, wisata kuliner dan belanja, dan wisata kota dan desa.



- c. Wisata ciptaan yang terdiri dari wisata MICE & event, wisata olahraga, dan wisata kawasan terpadu.

## 2. Pembangunan Destinasi Pariwisata

- a. Fasilitasi pembangunan destinasi pariwisata nasional yang menjadi fokus pemasaran pariwisata dengan bentuk advokasi penetapan kawasan peruntukan pariwisata dalam RTRW dan RDRW, bantuan penyusunan *site plan*, rancangan detail (*detail design*) kawasan destinasi wisata;
- b. Bersama para pemangku kepentingan pariwisata membangun fasilitas umum dikawasan wisata;
- c. Meningkatkan citra kepariwisataan; dan
- d. Menata kelembagaan organisasi pengelola destinasi, *Destination Management Organisation* (DMO).

## 3. Pembangunan Industri Pariwisata

- a. Pembinaan usaha pariwisata bagi masyarakat lokal;
- b. Fasilitasi investasi usaha sektor pariwisata;
- c. Fasilitasi pengembangan dan peningkatan jenjang keterampilan tenaga kerja lokal di bidang wisata; serta
- d. Mendorong terbangunnya sikap / mental penduduk lokal yang ramah terhadap wisatawan.

## 4. Pembangunan Kelembagaan Pariwisata

- a. Berkoordinasi dengan perguruan tinggi penyelenggara pendidikan sarjana dibidang kepariwisataan;
- b. Meningkatkan kapasitas dan kualitas lembaga pendidikan kepariwisataan, memperluas jurusan dan peminatan, membangun sekolah pariwisata; serta
- c. Turut serta menjaga kualitas pendidikan kepariwisataan yang diselenggarakan oleh Swasta.

Dalam upaya untuk mencapai sasaran pembangunan bidang kebudayaan nasional, maka arah kebijakan pembangunan bidang kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah :

1. Peningkatan registrasi dan kualitas perlindungan cagar budaya (situs, kawasan cagar budaya, dan kesejahteraan).
2. Peningkatan pengembangan dan pemanfaatan Budaya sebagai sarana pendidikan, rekreasi dan pengembangan kebudayaan dalam arti luas.



3. Peningkatan kualitas SDM dan organisasi pengelola Cagar Budaya.
4. Pengembangan dan peningkatan promosi Museum sebagai sarana edukasi, rekreasi dan pengembangan kebudayaan dalam arti luas.
5. Pengembangan dan peningkatan event apresiasi cagar budaya dan museum.
6. Peningkatan pendataan, kajian dan revitalisasi kesenian tradisional yang hampir punah.
7. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana pelatihan, pengembangan dan pagelaran seni budaya di Kota besar dan Ibu Kota Kabupaten.
8. Peningkatan fasilitasi dan dukungan pemberdayaan komunitas seni budaya dimasyarakat.
9. Peningkatan pengembangan dan pemanfaatan hasil-hasil kajian sejarah tradisional dan kearifan lokal untuk pengembangan seni budaya dan perfilman.
10. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan bidang seni dan film.

### 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Dengan mengacu pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD, maka perumusan Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dinyatakan pada tabel berikut:

**Tabel 3.2**  
**Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja**  
**Dinas Pariwisata dan Kebudayaan**  
**Kabupaten Kepulauan Anambas**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
			(1)
1	Meningkatkan Nilai Tambah Pariwisata	Meningkatkan Pengembangan Pariwisata dan Kebudayaan	Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan
			Persentase peningkatan length of stay wisatawan
			Jumlah budaya lokal yang dikembangkan menjadi daya tarik wisata
2	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas	Tata kelola Pemerintah yang Transparan, Akuntabel dan pelayanan yang berkualitas	Nilai AKIP Perangkat Daerah
			Nilai IKM Pelayanan Publik Perangkat Daerah



### 3.3 Program Dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang direncanakan telah dirumuskan melalui berbagai macam faktor yang menjadi pertimbangan. Mengacu pada Visi Misi Kabupaten Kepulauan Anambas, program dan kegiatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Selain itu, rumusan program dan Kegiatan mempertimbangkan juga beberapa faktor diantaranya:

1. Pendayagunaan Potensi Ekonomi Daerah;
2. Pengembangan Potensi Wisata Unggulan Daerah;
3. Peningkatan SDM yang berkualitas di bidang Seni dan Budaya Daerah;
4. Pengembangkan perikanan dan pariwisata sebagai basis sektor maritim serta pertanian yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan lokal dengan lingkungan hidup yang lestari;
5. Pengembangkan kehidupan masyarakat yang berakhhlakul Karimah dan berpayungkan budaya Melayu.
6. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi.

Dimana faktor tersebut dapat dicapai melalui sejumlah program, yakni:

1. Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata;
2. Program Pemasaran Pariwisata Ekonomi dan Kreatif;
3. Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah Kab/ kota
4. Program pengembangan Kebudayaan;
5. Program pengembangan Kesenian Tradisional;
6. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Rumusan program dan kegiatan juga mempertimbangkan isu-isu penting sebagaimana tercantum dalam sub bab 3.3.

Untuk lebih jelasnya,Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan ditunjukkan pada tabel berikut di halaman selanjutnya:

**Tabel 3.3**  
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2025**  
**Kabupaten Kepulauan Anambas**

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025 (TAHUN RENCANA)				CATATAN PENTING
						LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8			
3	26	01		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan Pemerintahan	KKA	100%	5.858.288.200		
3	26	01	2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tersedianya Dokumen Perencanaan	KKA	100%			
3	26	01	2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen yang dibuat	KKA	1 Dokumen	200.000.000	DAU +DBH	
3	26	01	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Kualitas SDM Di dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	KKA	100%			
3	26	01	2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pembayaran gaji dan tunjangan ASN	KKA	100%	3.638.036.916	DAU +DBH	
									Prioritas	



3	26	01	2	02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase pembayaran honor PPKD	KKA	100%	Rp 190.920.000	DAU +DBH	Prioritas
3	26	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Kualitas SDM Di dinas Pariwsata Dan Kebudayaan	KKA	100%			
3	26	01	2	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas Staf Disparbud	KKA	1 Paket	Rp -	DAU +DBH	Prioritas
3	26	01	2	05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Pelaksanaan Sosialisasi yang dikuti	KKA	100%	Rp 50.000.000	DAU +DBH	Prioritas
3	26	01	2	05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Pelaksanaan Bimtek Yang Diikuti	KKA	100%	Rp 250.000.000	DAU +DBH	Prioritas
3	26	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kualitas administrasi umum Di dinas Pariwsata Dan Kebudayaan	KKA	100%			
3	26	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase barang cetak dan penggandaan	KKA	100%	Rp 20.000.000	DAU +DBH	Prioritas
3	26	01	2	06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase fasilitasinya Kunjungan Tamu	KKA	100%	Rp 10.000.000	DAU +DBH	Prioritas
3	26	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Bahan Logistik kantor	KKA	100%	Rp 10.000.000	DAU +DBH	Prioritas
3	26	01	2	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Peralatan rumah tangga	KKA	100%	Rp 5.000.000	DAU +DBH	Prioritas
3	26	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase makan minum kegiatan	KKA	100%	Rp 10.000.000	DAU +DBH	Prioritas
3	26	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase surat kabar	KKA	100%	Rp 8.063.022	DAU +DBH	Prioritas
3	26	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Persentase Sarana Dan Prasarana Di	KKA	100%			

						Urusan Pemerintah Daerah	dinas Pariwsata Dan Kebudayaan					
3	26	01	2	07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas Kantor	KKK	1unit	Rp 1.000.000	DAU +DBH	Prioritas
3	26	01	2	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan mesin untuk kantor	KKK	1 unit	Rp 8.000.000	DAU +DBH	Prioritas
3	26	01	2	07	09	Pengadaan Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantort	KKK	1 unit	Rp 1.000.000	DAU +DBH	Prioritas
3	26	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Di Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	KKK	100%			
3	26	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Tersedianya Tv kabel dan listrik di kantor	KKK	100%	Rp 75.517.734	DAU +DBH	Prioritas
3	26	01	2	08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	KKK	100%	Rp 5.000.000	DAU +DBH	Prioritas
3	26	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Tersedianya alat Tulis Kantor	KKK	100%	Rp 20.000.000	DAU +DBH	Prioritas
3	26	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pembayaran honorarium PTT	KKK	100%	Rp 990.507.998	DAU +DBH	Prioritas
3	26	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Di Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	KKK	100%			

3	26	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemeliharaan peralatan dan mesin	KKA	100%	Rp 10.000.000	DAU +DBH	Prioritas
3	26	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Terbayarnya pajak kendaraan dinas	KKA	100%	Rp 5.242.530	DAU +DBH	Prioritas
3	26	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Tersedianya Gedung Kantor dan gudang	KKA	100%	Rp 350.000.000	DAU +DBH	Prioritas
3	26	02				Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase destinasi pariwisata yang dilakukan peningkatan	KKA	80%			
3	26	02	2	01		Pengelolaan Daya tarik wisata Kab/kota	Persentase Peningkatan Destinasi Pariwisata	KKA	80%			
3	26	02	2	01	03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kab/Kota	Jumlah Daya Tarik Wisata yang dikembangkan	KKA	2 Destinasi	5.000.000	DAU +DBH	Prioritas
3	26	02	2	03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Destinasi Pariwisata yang dilaksanakan oleh daerah	KKA	80%			
3	26	02	2	03	04	Pengadaan/Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun	KKA	5 Lokasi	5.000.000	DAU +DBH	Prioritas
3	26	03				Program Pemasaran Pariwisata	Persentase objek destinasi dan event pariwisata yang dipasarkan	KKA	83%			
3	26	03	02	01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase Kegiatan Pemasaran yang dilaksanakan oleh daerah	KKA	83%			

3	26	03	02	01	01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Media pemasaran yang digunakan	KKA	2 Media pemasaran	5.000.000	DAU +DBH	Prioritas
3	26	03	02	01	02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Event/Kegiatan yang dilaksanakan	KKA	2 Event/Kegiatan	5.000.000	DAU +DBH	Prioritas
3	26	03	02	01	05	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Kegiatan Monitoring dan Evaluasi yang terlaksana	KKA	1 Kegiatan	5.000.000	DAU +DBH	Prioritas
3	26	05				Program Pengembangan Sumber daya Pariwisata Dan ekonomi Kreatif	Percentase SDM sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang menerima pengembangan kompetensi	KKA	75%			
3	26	05	2	01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah Peserta Yang Mengikuti pelatihan	KKA	100 Peserta			
3	26	05	2	01	01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	jumlah peserta yang mengikuti pelatihan	KKA	50 peserta	5.000.000	DAU +DBH	Prioritas
2	22	02				Program Pengembangan Kebudayaan	Percentase pelaku seni untuk mengenal, memahami, menghargai dan ikut melestarikan nilai budaya	KKA	88%			
2	22	02	2	02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan yang diikuti untuk pengembangan kebudayaan	KKA	1 Kegiatan			

2	22	02	2	02	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional (FESTIVAL SILAT MELAYU PESISIR/SERUMPUN)	Terbinanya Kelompok penggiat seni dan Kebudayaan	KKA	52 Sanggar	5.000.000	DAU +DBH	Prioritas
2	22	02	2	01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan	KKA	1 Kegiatan			
2	22	02	2	01	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan ( PEKAN BUDAYA DAERAH/PEKAN BUDAYA NASIONAL)	Jumlah Kegiatan pengembangan kebudayaan	KKA	1 Kegiatan	5.000.000	DAU +DBH	Prioritas
2	22	03				Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase pertunjukan kesenian	KKK	70%			
2	22	03	2	01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan yang akan dilaksanakan	KKK	1 Kegiatan			
2	22	03	2	01	03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Pengadaan Alat-Alat Kesenian Tradisional	KKK	15 paket	Rp 5.000.000	DAU +DBH	Prioritas
2	22	05				PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase cagar budaya yang dilestarikan dan dikelola	KKK	75%			
2	22	05	2	01		PENETAPAN CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN/KOTA	Jumlah Cagar Budaya yang ditetapkan	KKK	2 Cagar Budaya			
2	22	05	2	01	01	PENDAFTARAN OBJEK DIDUGA CAGAR BUDAYA	Terdaftar dan terdatanya cagar budaya yang ada di kabupaten Kepulauan Anambas	KKK	2 Cagar Budaya	Rp 5.000.000	DAU +DBH	Prioritas



## BAB IV

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Program Dinas Pariwisata dan Kebudayaan merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Anambas.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Pencapaian target kinerja program (outcome) sebenarnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Kepulauan Anambas namun juga oleh sumber pendanaan lainnya (APBN, APBD Provinsi Kepulauan Riau, dan sumber-sumber pendanaan lainnya).



Rencana program, kegiatan, dan pendanaan indikatif adalah sebagai berikut:

<b>Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>5.858.288.200</b>
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	200.000.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	200.000.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.828.956.916
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.638.036.916
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp 190.920.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 300.000.000
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Rp -
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp 50.000.000
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp 250.000.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 63.063.022
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp 20.000.000
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp 10.000.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 10.000.000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp 5.000.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 10.000.000



Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp 8.063.022
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 10.000.000
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp -
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 10.000.000
Pengadaan Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Rp -
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 1.091.025.732
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 75.517.734
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 5.000.000
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 20.000.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 990.507.998
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 365.242.530
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 10.000.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 5.242.530
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp 350.000.000
<b>Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata</b>	<b>Rp 10.000.000</b>
Pengelolaan Daya tarik wisata Kab/kota	Rp 5.000.000
Pengembangan Daya Tarik Wisata Kab/Kota	5.000.000



Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	5.000.000
Pengadaan/Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	5.000.000
<b>Program Pemasaran Pariwisata</b>	<b>15.000.000</b>
Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	15.000.000
Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	5.000.000
Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	5.000.000
Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	5.000.000
<b>Program Pengembangan Sumber daya Pariwisata Dan ekonomi Kreatif</b>	<b>5.000.000</b>
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	5.000.000
Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	5.000.000
<b>Program Pengembangan Kebudayaan</b>	<b>Rp 10.000.000</b>
Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	5.000.000
Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional (FESTIVAL SILAT MELAYU PESISIR/SERUMPUN)	5.000.000
Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp 5.000.000
Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan ( PEKAN BUDAYA DAERAH/PEKAN BUDAYA NASIONAL)	Rp. 5.000.000



<b>Program Pengembangan Kesenian Tradisional</b>	<b>Rp 5.000.000</b>
Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp 5.000.000
Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Rp 5.000.000
<b>PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA</b>	<b>Rp 5.000.000</b>
PENETAPAN CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN/KOTA	Rp 5.000.000
PENDAFTARAN OBJEK DIDUGA CAGAR BUDAYA	Rp 5.000.000
<b>TOTAL</b>	<b>Rp 5.903.288.200</b>



## PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2024, sesuai dengan sifatnya adalah sebagai dokumen perencanaan taktis tahunan sebagai landasan operasional program dan kegiatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Anambas. Isi dari Rencana Kerja lebih memusatkan seluruh perencanaan pembangunan pada arah dan tujuan jangka pendek dan mendukung sebagian arah pembangunan jangka menengah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan RPJM Kabupaten Kepulauan Anambas 2022 – 2027. Dalam pelaksanaannya, dokumen ini harus dimanfaatkan secara efektif dan efisien, serta perlu disosialisasikan pada semua fungsi *stakeholder* yang terkait untuk meningkatkan keberhasilan pelaksanaannya. Dengan demikian, Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2024 harus dapat berfungsi sebagai :

1. Pedoman dan acuan dasar yang secara konsisten diimplementasikan dalam penyusunan Kegiatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 baik dalam lingkup program maupun kegiatan.
2. Pengikat sinergi dalam pelaksanaan kegiatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Anambas untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan bersama.
3. Landasan bagi perencanaan pembangunan tahap selanjutnya.

Rencana kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 ini berisikan kebijakan, strategi, program, dan kegiatan-kegiatan pembangunan dan pengembangan di sektor Pariwisata dan Kebudayaan di Kabupaten Kepulauan Anambas. Dalam pelaksanaannya Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 ini perlu ditunjang dengan petunjuk operasional maupun rencana tindak lanjut yang lebih rinci untuk setiap item program / kegiatannya. Dukungan yang optimal dari Pemerintah Kabupaten / Kota, Masyarakat dan *stakeholder* pariwisata dan budaya



sangat diharapkan untuk menyukseskan Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Anambas. Sesuai dengan visi dan misi pembangunan dan pengembangan pariwisata dan budaya di Kabupaten Kepulauan Anambas, Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Anambas ini diharapkan dapat mendorong terwujudnya kemajuan pariwisata dan budaya melayu yang mengangkat harkat, memperkuat identitas melayu, dan meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

Peran serta maksimal dari seluruh potensi *stakeholder* Pariwisata dan kebudayaan dalam rangka penyusunan rencana ini mutlak diperlukan, sehingga peran dan tanggung jawab pelaku pembangunan dapat terakomodasi. Harapannya rencana kerja ini dapat mendorong peningkatan pelayanan publik yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Anambas.

Tarempa, 06 Februari 2024

**KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**



**EFFI SJUHAIRI, S.Sos**  
**Pembina Utama Muda / IV.c**  
**NIP. 19710602 200212 1 007**